

Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

[Implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Semambung Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency]

Della Putri YuliaSari¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyaha²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Semambung Village, Wonoayu District, utilizing Edward III's theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, documentation, and the Miles and Huberman data analysis model. The findings indicate that while internal communication has been reasonably effective, communication with the community remains limited. Supporting facilities are adequate but are hindered by internet connectivity issues, budget constraints, and reliance on a single operator. Despite the absence of specific incentives, the operator demonstrates a high level of commitment. Furthermore, the lack of written Standard Operating Procedures (SOP) specific to SIKS-NG means that implementation still relies on verbal instructions. In conclusion, successful SIKS-NG implementation requires improved external communication, strengthened human resources and budget allocations, better internet connectivity, and the development of SOP to enhance the accuracy and efficiency of social welfare data management.*

Keywords - Siks-ng; Social Welfare Information System; Policy Implementation

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, menggunakan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal telah berjalan cukup efektif, namun komunikasi dengan masyarakat masih terbatas. Fasilitas pendukung memadai, tetapi terkendala jaringan internet, keterbatasan anggaran, dan hanya satu operator. Meskipun tanpa insentif khusus, operator menunjukkan komitmen tinggi. Selain itu, belum tersedia SOP tertulis khusus SIKS-NG sehingga pelaksanaan masih mengandalkan arahan lisan. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi SIKS-NG memerlukan peningkatan komunikasi eksternal, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, perbaikan jaringan internet, serta penyusunan SOP guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data kesejahteraan sosial.*

Kata Kunci - Siks-ng; Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial; Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merubah seluruh dunia, dan teknologi komputer memudahkan hal tersebut. Diketahui bahwa proses yang memakan waktu dan dilakukan berulang kali bisa membuat pekerjaan lebih efektif. Peran komputer sangat penting agar semua aktivitas di sebuah lembaga bisa berjalan lancar [1]. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat interaksi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri, memberi kekuatan kepada masyarakat melalui akses informasi, serta menjadikan pengelolaan pemerintahan lebih efisien. Selain itu, penerapan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah juga membantu mengurangi tindakan korupsi, meningkatkan transparansi, memudahkan urusan, meningkatkan pendapatan, dan atau menghemat biaya.[2]. Penerapan e-governance dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia didukung oleh diterbitkannya aturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang termuat dalam Perpres

No. 95 Tahun 2018 sebagai fondasi pelaksanaannya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau biasa disebut SPBE merupakan landasan pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi atau digital yang outputnya menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. [3]. Seiring dengan perkembangan teknologi pengelolaan data kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian utama pemerintah. Sistem yang panjang dan rumit sekarang dapat disederhanakan dan dibuat lebih bertanggung jawab melalui teknologi komputer. Data kesejahteraan sosial harus dijalankan dengan cermat, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pemberiannya. Aturan tentang DTKS yang termuat dalam Permensos No. 3 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga bantuan sosial dalam proses penyalurannya bisa terealisasi dalam jangkauan yang lebih tepat sasaran, efektif, serta efisien kepada masyarakat yang berhak menerimanya. DTKS adalah sistem basis data yang menyimpan informasi mengenai orang-orang yang menerima berbagai program bantuan sosial di bawah pengelolaan pemerintah. [4].

Menurut PP No. 39 Tahun 2012, tercapainya kesejahteraan sosial menjadi prasyarat fundamental dan wajib dipenuhi untuk setiap warga negara. Kesejahteraan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi, spiritual maupun sosial agar masyarakat dapat hidup dengan layak dan terus berkembang, sehingga mampu mengoperasikan peran serta fungsi sosialnya dengan baik. [5]. Kesejahteraan sosial sangat bersinggungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan ketika individu atau seseorang atau keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, dan lingkungan sekitar tidak memberikan peluang untuk mengoptimalkan kualitas hidup secara berkelanjutan atau untuk mengurangi risiko kesulitan. [6]. Pelaksanaan adalah cara melakukan suatu rencana yang sudah dibuat dengan rapi, hati-hati, dan terperinci. Pelaksanaan hanya dilakukan jika rencana tersebut sudah siap dan matang, atau sudah dibuat jauh sebelumnya, agar ada kepastian dan ketajaman dalam menjalankan rencana tersebut. Indikator menurut Edward III (2016) adalah untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program yang berisi indikator berupa struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. [7].

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yaitu suatu sistem pengembangan dari Kemensos RI agar bisa menunjang pengajuan data baru serta pemutakhiran basis data masyarakat yang membutuhkan secara terintegrasi. Aplikasi ini juga membantu dalam mengelola Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Data sangat penting dalam program penanggulangan kemiskinan karena terkait langsung dengan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dalam menentukan tujuan program penanganan kemiskinan, penting untuk memastikan program tersebut berjalan efektif. Berdasarkan amanat dalam aturan tentang Penanganan Orang Miskin yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 2011 serta Kepmensos RI No. 57/HUK/2017 mengenai Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Miskin Tahun 2017, seluruh daerah kota dan kabupaten di negara Indonesia memiliki kewajiban melaksanakan pemeriksaan serta memverifikasi data. Guna memfasilitasi pelaksanaan serta pengawasan manajemen data kesejahteraan sosial, Pusdatin Kemensos telah mengembangkan SIKS-NG. Aplikasi ini bertujuan mendukung peningkatan kualitas Basis Data Terpadu, sehingga pemerintah dapat melakukan pembaruan data kesejahteraan sosial secara lebih efektif, tepat, dan efisien. Kehadiran program ini diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menyelesaikan berbagai masalah yang muncul karena adanya usulan data yang tidak tepat dan tidak tepat sasaran. [8].

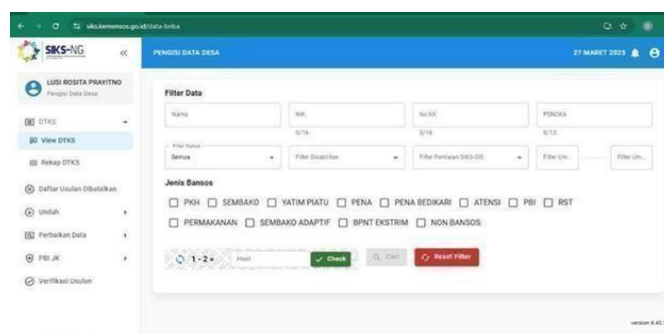
Sebelum diterapkannya SIKS-NG proses pendataan bantuan sosial yang ada di Desa Semambung masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ditemukannya data ganda serta masih tercatatnya penerima bantuan yang telah meninggal dunia dalam daftar penerima serta tidak sedikit masyarakat miskin yang seharusnya berhak justru belum terdaftar atau tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Sejak implementasi aplikasi SIKS-NG pada tahun 2018, proses pengumpulan data dan pengelolaan data kesejahteraan sosial menjadi lebih sistematis dan akurat. Operator desa dapat langsung memverifikasi apakah seseorang masih memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi. Aplikasi SIKS-NG tidak secara langsung mempengaruhi pencairan bantuan, karena pencairan dilakukan melalui transfer ATM. Namun, aplikasi ini menyederhanakan proses validasi data penerima, seperti mendeteksi penerima yang telah meninggal dunia atau yang sudah mampu secara ekonomi. Operator desa hanya perlu mengunggah akta kematian atau melakukan musyawarah desa untuk menghentikan bantuan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat lagi. SIKS-NG juga memiliki berbagai fitur penting, seperti lihat DTKS untuk melihat data penerima, penggantian pengurus jika kepala keluarga meninggal dunia, dan pengajuan atau penghentian PBI JK (BPJS secara gratis dari APBN). Selain itu, pengelolaan bantuan seperti PKH dan BPNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga dipantau, meskipun penyalurannya masih bergantung pada pihak lain seperti Kementerian Sosial atau Layanan Sosial. Untuk mendukung pendataan, pemutakhiran, serta pemantauan data bantuan sosial tersebut, digunakan aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan oleh perangkat desa. Tampilan awal aplikasi SIKS-NG dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Halaman Login Aplikasi SIKS-NG 2025
Sumber : OperatorSIKS-NG Desa Semambung

Berdasarkan Gambar 1, aplikasi SIKS-NG diawali dengan menampilkan halaman login yang digunakan untuk mengakses sistem pendataan kesejahteraan sosial. Aplikasi ini tidak dapat diakses oleh seluruh pihak, melainkan hanya oleh operator desa maupun pengguna yang telah memperoleh kewenangan. Pada halaman login, ada beberapa elemen utama, seperti bidang untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi, captcha sebagai langkah verifikasi keamanan, dan tombol "Login" untuk mengakses sistem. Selain itu, ada juga opsi "Log In to SIKS-GIS" yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem berbasis GIS (Sistem Informasi Geografis) terkait data tentang kesejahteraan sosial. Untuk menjaga keamanan data, sistem SIKS-NG secara otomatis meminta pengguna untuk mengubah kata sandi setiap 90 hari atau setiap tiga bulan. Jika sandi telah melewati batas waktu tersebut, pengguna harus memperbaruinya sebelum dapat mengakses layanan dalam aplikasi.

Aplikasi SIKS-NG yakni suatu aplikasi berbasis digital yang proses pengembangannya dimaksudkan sebagai sarana pengelolaan data kesejahteraan sosial dan data masyarakat miskin di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dan dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari penerapan e-government dalam pelayanan sosial. Tujuan utama SIKS-NG adalah membantu pemerintah dalam pengelolaan Data, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan sosial, dengan tujuan mencapai ketepatan sasaran, efektivitas, dan transparansi yang lebih baik.. Manfaat aplikasi SIKS-NG adalah berperan penting dalam mendukung pemerintah mengelola, memperbarui, dan memverifikasi data penduduk miskin secara digital. Dengan hadirnya aplikasi ini, proses penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih akurat, efektif, efisien, dan transparan. Dalam implementasi aplikasi SIKS-NG, terdapat berbagai fitur yang digunakan untuk mendukung proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial. Melalui fitur tersebut, operator dapat melihat data masyarakat yang terdaftar dalam DTKS serta mengetahui jenis bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat. Tampilan fitur data dan jenis bantuan sosial pada aplikasi SIKS-NG, yaitu:



Gambar 2. Tampilan Menu DTKS Pada Aplikasi SIKS-NG Tahun 2025
Sumber : Operator SIKS-NG Desa Semambung

Mengacu gambar tersebut, aplikasi SIKS-NG memiliki berbagai menu yang digunakan dalam rangka menunjang pendataan serta pengelolaan data kesejahteraan sosial. Salah satu menu yang tersedia adalah menu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melihat dan memverifikasi data masyarakat yang terdaftar dalam

basis data kesejahteraan sosial. Melalui menu tersebut, petugas dapat melakukan pencarian dan penyaringan data berdasarkan nama, NIK, nomor KK, status disabilitas, maupun jenis bantuan sosial yang diterima masyarakat. Selain itu, dalam aplikasi SIKS-NG terdapat berbagai jenis bantuan sosial yang dapat diidentifikasi sesuai dengan data penerima, yang terdiri dari berbagai program bantuan sosial, antara lain PKH, PBI, dan BPNT, serta bantuan sosial lainnya seperti Anak Yatim, PENA, Pangan, dan Bantuan Non Sosial. Fitur-fitur tersebut membantu operator dalam melakukan pencarian, pengelompokan, verifikasi, serta pemutakhiran data masyarakat penerima bansos sehingga proses penyalurannya sesuai sasaran. Berdasarkan informasi dalam SIKS-NG, jumlah penerima bantuan sosial di Desa Semambung terdiri dari beberapa jenis program bantuan sosial. Tabel 1 berikut menyajikan data jumlah penerima bantuan sosial.

Tabel 1. Data Penerimaan Bantuan Sosial di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima
1.	PKH	182 KPM
2.	BPNT	296 KPM
3.	PBI (KIS)	1.417 KPM
	Total	1.895 KPM

Sumber : Data Aplikasi SIKS-NG Dari wawancara dengan Operator Desa Semambung 2025

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa jumlah penerima bantuan sosial di Desa Semambung pada tahun 2024 mencapai 1.895 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jenis bantuan dengan jumlah penerima terbanyak adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) sebanyak 1.417 KPM, diikuti BPNT sebanyak 296 KPM, dan PKH sebanyak 182 KPM. Tingginya jumlah penerima bantuan sosial tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Semambung yang termasuk dalam kategori rentan secara sosial dan ekonomi sehingga memerlukan dukungan dari program bantuan pemerintah. Data tersebut juga menunjukkan pentingnya peran aplikasi SIKS-NG dalam membantu pemerintah desa mengelola pendataan, memverifikasi, dan pemutakhiran data penerima bansos agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Melalui sistem ini, data penerima bantuan bisa dikelola lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengawasan dan pengendalian program bantuan sosial.

Kendala utama dalam menggunakan aplikasi ini hanya terbatas pada jaringan internet. Dari sisi teknis, aplikasi ini stabil dan dilengkapi dengan fitur validasi data berdasarkan titik koordinat dan dokumentasi foto rumah penerima. Namun, masyarakat umum tidak bisa mengakses aplikasi SIKS-NG, dan hanya dapat dioperasikan petugas yang ditunjuk, contohnya yaitu TKSK, Dinas Sosial, serta operator desa. Sementara itu, masyarakat tanpa akses langsung terhadap aplikasi tersebut dan hanya dapat memperoleh informasi melalui layanan publik yang tersedia, seperti Sipraja dan Plafon. Saat ini, pengelolaan SIKS-NG di Desa Semambung hanya ditangani oleh satu operator. Tugas input dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, seperti penyampaian PBI JK hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-10, sedangkan pengusulan dan penghentian data dilakukan antara tanggal 20-25 setiap bulannya. Selebihnya, operator hanya memperbarui data seperti koreksi nama atau alamat yang dapat dilakukan kapan saja. Dengan adanya SIKS-NG, diharapkan proses pendataan penerima bansos menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan mengurangi potensi penyimpangan data. Meski indikator keberhasilan spesifik belum ditentukan, keberadaan sistem ini dirasakan memudahkan perangkat desa dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Dalam membuat artikel ilmiah ini, penelitian terdahulu berperan sebagai landasan sekaligus acuan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Salah satu penelitian yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan pada 2022 berjudul “Implementasi Penerapan Sistem Informasi Geografis Generasi Berikutnya Penerapan Sistem Kesejahteraan Sosial dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)” yang dilakukan oleh Radjikan, Nova Rochmatul Faiza, dan Teguh Santoso. Hasilnya yaitu penerapan SIKS-NG di Kabupaten Gedangan belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kendala dalam proses pemutakhiran data yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam menguasai sistem aplikasi, serta minimnya fasilitas pendukung dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Selain itu, studi tahun 2023 berjudul “Efektivitas Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang” yang dilakukan oleh Muhamad Rifa'I, Tajul Ulum, dan Annisa Purwatiningsih menunjukkan bahwa dalam proses mengelola data kesejahteraan sosial lewat SIKS-NG, permasalahan terkait

keterbatasan akses jaringan internet di wilayah tertentu, serta ketidaksiapan petugas dalam mengoperasikan aplikasi secara maksimal.

Berdasarkan hasil kajian tahun 2023 berjudul “Implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolahan Data Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan” oleh Yevi Andriani, Tri Yuningsih dan Sri Suwitri menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG belum efektif sepenuhnya untuk membantu proses pengolahan data kemiskinan, Karena kurangnya pembaruan data secara berkala dan minimnya sosialisasi kepada perangkat desa yang telah menjadi pelaksana di lapangan. Dengan permasalahan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, penulis terdorong meneliti dengan menjadikan “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG) di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu” sebagai judul penelitian ini serta menjadi upaya untuk mempelajari lebih dalam tentang implementasi SIKS-NG di wilayah desa, mengingat aplikasi ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial berbasis data yang akurat dan valid.

II. METODE

Dalam studi berjudul “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu”, yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana aplikasi SIKS-NG diimplementasikan melalui pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna di balik suatu fenomena, serta memahami tindakan, perilaku, dan pengalaman subjek penelitian berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengetahui secara detail bagaimana implementasi SIKS-NG mendukung layanan berbasis digital yang efektif dan efisien di Desa Semambung, Wonoayu, Sidoarjo. Lokasi penelitian di Desa Semambung, karena desa telah memanfaatkan aplikasi SIKS-NG dalam proses pengelolaan data bansos bagi masyarakatnya. Teknik mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Pelaksanaan wawancara langsung pada informan terkait yaitu operator Aplikasi SIKS- NG Desa Semambung untuk mendapatkan informasi primer terkait pelaksanaan aplikasi. Dilakukan pengamatan untuk mengamati secara langsung proses penggunaan aplikasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan di lapangan. Sementara itu, metode dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data sekunder yang sesuai akan pelaksanaan studi ini. Informan yang dimaksud yaitu Ibu Lusi Rosita Prayitno, yang menjabat sebagai operator aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung selaku informan, Bapak Rizal Havidhi Ismail selaku kepala pelayanan dan masyarakat setempat.

Teknik sampling melalui teknik purposive sampling, yakni suatu pendekatan di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik atau kriteria spesifik yang selaras dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, model analisis data dari Miles & Huberman dipakai untuk analisis data dengan melibatkan empat tahapan krusial. Tahapan awal adalah langkah mengumpulkan data, yang dilakukan melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara sepanjang proses penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data, dimana data yang telah diperoleh disaring, difokuskan, dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis, yang dimulai sejak peneliti menentukan ruang lingkup fokus penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data, yang dilakukan secara terstruktur sekaligus berurutan dalam rangka memberi gambaran jelas terkait proses analisis. Tahap keempat adalah pembuatan kesimpulan yaitu dengan menafsirkan data melalui proses pengelompokan, dekomposisi, dan peninjauan yang komprehensif untuk mendapatkan temuan yang bermakna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Komunikasi bisa dinyatakan sebagai sebuah proses penerimaan, penyampaian, serta pengolahan pesan yang berlangsung dalam diri individu maupun oleh beberapa pihak demi meraih tujuan bersama. Komunikasi umumnya mencakup komunikasi eksternal dan internal. [9]. Dalam konteks penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung, proses komunikasi antar perangkat desa memegang peran penting terutama dalam pembaruan data dan pengambilan keputusan terkait kelayakan bantuan sosial. Komunikasi internal memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik yang tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi. Melalui komunikasi internal yang baik, kesalahpahaman dapat lebih cepat dipahami dan permasalahan dapat diluruskan secara tepat. Pada komunikasi internal perangkat Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu telah memiliki pembagian peran dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG. Terdapat satu orang operator yang menjalankan fungsi teknis aplikasi meskipun tanggung jawab struktural berada di bawah Kasi Kesejahteraan (Kasikesra). Operator ini bertugas melakukan pembaruan data, koordinasi perubahan informasi, dan pelaporan melalui sistem aplikasi agar data yang dinput berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu Lusi Prayitno, selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung:

“untuk pengelolaan aplikasi SIKS-NG karena saya sebenarnya itu cuma operatornya sebenarnya yang pegang itu kasikesra, kasikesranya disini itu kan sudah sepuh jadi saya yang membantu mengoperasikan jadi kalau disini untuk pembaruan data, dan untuk info pengupdate an aplikasi saya sampaikan ke kasikesranya dulu nanti setelah itu kasikesra yag ke pimpinan misalnya kalau ada yang meninggal akan di nonaktifkan dan juga misalnya ada yang mau dimasukkan atas namanya kita koordinasi dulu, kasikesra sama pimpinan koordinasi dulu apakah ini harus dimasukkan apa enggak nanti saya yang eksekusi” (Wawancara, 01 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, komunikasi internal dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung telah berjalan melalui koordinasi antara operator, Kasi Kesejahteraan, dan pimpinan desa dalam proses pembaruan data maupun pengambilan keputusan terkait usulan penerima bantuan sosial. Komunikasi tersebut dilakukan secara berjenjang sehingga setiap perubahan data dapat diverifikasi terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam sistem.

Selain komunikasi internal, implementasi aplikasi SIKS-NG juga melibatkan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang terjalin antara organisasi dan pihak-pihak eksternal, dalam hal ini masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam pelaksanaannya, komunikasi eksternal antara pengelola aplikasi dan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai status bantuan sosial yang diajukan melalui aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pihak desa, sementara masyarakat tidak memiliki fasilitas untuk memantau status pengajuan maupun pencairan secara mandiri. Masyarakat hanya mengetahui perkembangan bantuan apabila mereka secara aktif bertanya langsung ke kantor desa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lusi Rosita Prayitno, selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung :

“kalau selama ini yaa penerima bantuan sosial itu kalau di siks-ng itu karena penerimaan bantuan sosial sebelumnya bukan aku yang pegang karena aku pegang itu mulai dari tahun 2018 setelah adanya aplikasi dan itu bantuan sudah berjalan dari tahun sebelumnya jadi yang saya tahu yang peneriman real sama siks-ng ada beberapa yang di siks-ng enggak cair ada yang enggak memang orangnya ini di siks-ng ini misalnya dia mendapatkan bantuan pangan tunai tapi di realnya orangnya enggak mendapatkan jadi kan mulainya siksng diperalihkan enggak tunai tapi melalui ATM. Cair gak cair kan desa enggak ada yang tau kalau orangnya enggak bilang ke kita yaa kita enggak tau jadinya kalau ada beberapa yang bilang ohh iyaa saya cek dulu ke dtks nya ohh iyaa bu sudah enggak njenengan udah enggak cair berarti bener benr di siks ng ini memang sudah enggak dapat bantuan ada yang seperti itu ada juga orangnya yang aku dulu pernah dapat mbak tapi sekarang kok enggak dapat ternyata di siks ng nya dia masih dapat tapi kalau dari desa kan enggak bisa langsung dapat lagi jadi harus ada pendampingnya, jadi dari dinas sosial ada slt sama tksk yang tutun mendampingi desa sama kecamatan” (Wawancara, 20 Maret 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai pencairan maupun status bantuan sosial belum dapat diketahui secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi SIKS-NG. Mewajibkan para warga untuk mendatangi balai desa bagian kantor pelayanan secara langsung agar mendapatkan data atau kejelasan mengenai informasi terkait bantuan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih bersifat satu arah dan bergantung pada komunikasi langsung antara masyarakat dengan operator aplikasi SIKS-NG. Untuk memperkuat temuan tersebut, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelayanan informasi terkait bantuan sosial dilakukan melalui ruang pelayanan Desa Semambung seperti berikut ini:



Gambar 3. Ruang Pelayanan Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025.

Mengacu gambar tersebut, terlihat penyampaian informasi mengenai prosedur pengajuan bantuan sosial di Desa Semambung dilakukan secara langsung oleh operator aplikasi SIKS-NG kepada masyarakat yang datang ke kantor desa. Sosialisasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan bantuan sosial belum dilaksanakan secara formal melalui pertemuan masyarakat maupun melalui RT/RW. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Lusi Rosita Prayitno selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung yang menyatakan:

“kalau sosialisasi disini enggak tapi kalau misalnya ada orang bertanya mbak saya mau mengajukan untuk bantuan A nanti saya bilang untuk mendapatkan bantuan anda harus masuk ke data DTKS atau data enggak kalau saya bilangannya gampangannya masih harus masuk data miskin dulu nanti kalau masuk ini harus melengkapi berkas ini jadi kalau belum masuk ini tidak bisa mengajukan untuk mendapat bantuan ini. Jadi kalau sosialisasinya jika ada orang yang bertanya untuk meminta bantuan maka harus ke saya infokan kalau bantuan sekarang melalui aplikasi ini lo harus masuk ini dulu lo datanya harus masuk ini harus ada share lokasinya harus ada foto rumahnya datanya harus scan an asli. jadi enggak saya infokan ke RT takutnya nanti akan jadi miskomunikasi jadi misalnya kalau ada orang yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan harus ke saya langsung” (Wawancara, 20 Maret 2025).

Namun pernyataan dari masyarakat justru menunjukkan persepsi yang berbeda. Salah satu warga Desa Semambung, Vinka Najwa Faradila, menyampaikan bahwa :

“Untuk penyampaian informasi yang disampaikan oleh perangkat desa sudah cukup baik” (Hasil wawancara, 04 Agustus 2025). Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi pelaksana kebijakan komunikasi dianggap belum optimal secara sistematis, sebagian masyarakat menilai bahwa informasi yang diterima sudah memadai. Kondisi ini dipicu oleh perbedaan pengalaman langsung, karena warga yang aktif bertanya mungkin merasa sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa komunikasi tidak menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata dan cenderung bersifat pasif. Maka dari hal tersebut, perlu adanya strategi komunikasi lebih terbuka, terstruktur, serta melibatkan elemen masyarakat seperti RT/RW untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang sama terkait prosedur dan status bantuan sosial.

Berlandaskan wawancara tersebut, dinyatakan komunikasi pada penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung belum optimal. Komunikasi internal antar perangkat desa sudah berjalan melalui pembagian tugas antara operator dan Kasi Kesejahteraan, namun masih bergantung pada koordinasi manual. Pada komunikasi eksternal, akses informasi masyarakat sangat terbatas karena tidak adanya sosialisasi formal, sehingga informasi hanya diberikan kepada warga yang datang langsung. Temuan ini juga disandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Nova Rochmatul Faiza, Teguh Santoso dan Radjikan, yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)” menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi aplikasi SIKS-NG GIS masih belum maksimal. Kondisi tersebut ditunjukkan dari masih kurangnya sosialisasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan aplikasi serta belum optimalnya koordinasi pemerintah daerah dengan pusat. Keterbatasan pemahaman aparat terhadap sistem e-government juga turut menjadi hambatan dalam penyampaian informasi yang efektif, baik secara internal antarinstansi maupun kepada masyarakat [10].

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan seluruh potensi yang memiliki potensi atau nilai yang bisa dimanfaatkan guna memenuhi keperluan atau menunjang aktivitas manusia. Di antara beragam jenis sumber daya, SDM adalah yang sangat krusial. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen kunci yang sangat vital dalam mendorong tercapainya tujuan organisasi maupun perusahaan. Dibandingkan dengan sumber daya lainnya, seperti modal dan teknologi, SDM memiliki peran yang lebih penting karena manusia bertindak sebagai pengelola, pengendali, dan penggerak seluruh sumber daya yang tersedia. Tanpa dukungan yang mencukupi, baik itu dari aspek sarana prasarana, SDM, ataupun teknologi pendukung sebuah kebijakan sulit untuk diimplementasikan secara optimal [11]. Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang terlibat penentu signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya tenaga yang kompeten atau ketidaksesuaian kemampuan dapat menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan kebijakan. Selain itu, tersedianya SDM yang kompeten dan mencukupi akan memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kualitas SDM berperan krusial untuk penentuan keberhasilan tujuan suatu program. Dalam konteks implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung, sumber daya manusia secara umum telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan aplikasi. Namun, pengelolaan aplikasi yang masih bergantung pada satu orang operator menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operator di lapangan. Meskipun masih terdapat kendala seperti jaringan internet yang terkadang tidak stabil, secara umum desa telah berupaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem tersebut. Ketersediaan sarana prasana di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, dinilai telah memadai sehingga mampu mendukung pelaksanaan dan pengoperasian aplikasi SIKS-NG dengan baik. Sarana

yang tersedia antara lain berupa komputer, laptop, printer, handphone, dan LCD, yang keseluruhannya berada dalam kondisi baik. Selain sarana fisik, sumber daya lainnya berupa anggaran juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan aplikasi. Namun demikian, Desa Semambung belum tersedia anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung penerapan SIKS-NG. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Lusi Rosita Prayitno, selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung :

“kalau untuk sarana prasarana itu sudah inklut ke pribadi sendiri kayak saya di TU jadi pakek parangkatnya TU” (Hasil wawancara, 01 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam hal anggaran, implementasi aplikasi SIKS-NG masih bergantung pada fasilitas yang tersedia di masing-masing bagian, tanpa dukungan pembiayaan yang khusus dialokasikan oleh desa. Terkait pengelolaan bantuan sosial, seperti penyaluran sembako, Ibu Lusi juga menjelaskan bahwa jumlah dan nilai pengeluarannya saat ini masih dalam proses transisi pengolahan di dalam aplikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Lusi Rosita Prayitno selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung :

“Masih dalam pengolahan transisi di aplikasi SIKS-NG, sehingga rincian pasti belum sepenuhnya tercatat dalam sistem.” (Hasil wawancara, 01 Agustus 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi sistem pendukung, penggunaan aplikasi masih belum berfungsi secara optimal, karena belum dapat mencatat secara detail seluruh transaksi atau kegiatan penyaluran bantuan sosial. Kondisi ini bisa menjadi kendala dalam hal transparansi dan efisiensi pengelolaan data bantuan. Untuk mendukung implementasi aplikasi SIKS-NG, ketersediaan sarana prasarana adalah hal krusial pada indikator sumber daya. Ketersediaan sarana prasarana secara memadai termasuk faktor penunjang dalam meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator aplikasi SIKS-NG, Desa Semambung telah menyediakan beberapa fasilitas pendukung yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi. Data sarana prasarana di Desa Semambung, yaitu:

Tabel 2. Data Jumlah Sarana Dan Prasarana Di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

NO	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	2	Baik
2.	Laptop	3	Baik
3.	Printer	4	Baik
4.	HP	1	Baik
5.	LCD	1	Baik

Sumber: Data dari wawancara dengan Operator Desa Semambung, 2025

Mengacu data tersebut, Desa Semambung sudah mempunyai cukup sarana prasarana yang memadai untuk menunjang implementasi aplikasi SIKS-NG. Fasilitas yang tersedia meliputi komputer, laptop, printer, handphone, dan LCD yang seluruhnya berada dalam kondisi baik. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya dukungan perangkat kerja yang dapat menunjang pelaksanaan tugas operator dalam mengelola data bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan sarana dan prasarana masih memanfaatkan perangkat yang tersedia pada masing-masing bagian, sehingga belum terdapat fasilitas khusus yang dialokasikan secara spesifik untuk pengelolaan aplikasi SIKS-NG, ketidakstabilan jaringan internet juga dapat menghambatan signifikan yang mempersulit kelancaran proses pengoperasian aplikasi tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana secara umum sudah tersedia, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung.

Hasil penelitian menunjukkan indikator sumber daya untuk proses penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung belum terpenuhi sepenuhnya. Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan aplikasi secara teknis hanya dilakukan oleh satu orang operator, sementara Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) sebagai penanggung jawab utama tidak terlibat langsung dalam pengoperasian karena faktor usia. Dari sisi sarana dan prasarana, perangkat contohnya sudah ada komputer sekaligus printer berkategori baik, namun terkadang jaringan internet tidak stabil sehingga operator menggunakan jaringan pribadi. Selain itu, tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan aplikasi ini. Dengan demikian, keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi SIKS-NG. Temuan ini juga disandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Tajul Ulum, Muhamad Rifa'i, Annisa Purwatiningsih yang berjudul “Efektivitas Sampang” memperlihatkan pengelolaan aplikasi SIKS-NG di tingkat kabupaten belum berjalan secara optimal. Meskipun pengelolaan data telah mengacu pada

Permensos No. 3 Tahun 2021, akan tetapi masih ada kendala contohnya ketidaksinkronan data dengan Disdukcapil, lemahnya pemutakhiran data, dan data penerima bantuan yang belum tepat sasaran [12].

C. Disposisi

Edwards III (1980:89) menerangkan bahwa disposisi adalah salah satu variabel yang sifatnya penting yang berkaitan erat dengan variabel sebelumnya. Sikap atau kecenderungan pelaksana terhadap suatu kebijakan akan memengaruhi proses implementasinya. Apabila pelaksana memiliki pandangan yang sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila antara pelaksana dan pembuat kebijakan tersebut memiliki perbedaan pandangan, proses implementasi bisa menjadi lebih kompleks dan berpotensi menghadapi berbagai kendala. [13]. Oleh karena itu, penempatan pegawai yang tepat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen, dedikasi, sikap, dan tanggung jawab pelaksana merupakan faktor yang sifatnya penting untuk mendukung keberhasilan suatu program. Bila dedikasi yang kuat tidak ada, maka pelaksanaan kebijakan bisa menghadapi berbagai kendala. Dengan demikian, diperlukan pelaksana yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik.

Kondisi tersebut terlihat dalam pelaksanaan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung, di mana pelaksana tetap menjalankan tugas meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, salah satunya belum tersedianya insentif khusus bagi operator. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lusi Rosita Prayitno, selaku operator aplikasi SIKS-NG Di Desa Semambung :

“enggak, karena sekarang sudah enggak ada insentif untuk pemegang operator karena sudah sesuai dengan tupoksinya.” (Hasil wawancara, 01 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan tingginya dedikasi dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya meskipun tidak didukung oleh penghargaan dalam bentuk materi. Meskipun tidak memperoleh insentif khusus, operator tetap bertugas sebagaimana tanggung jawab terkait. Selain itu, pelaksana juga tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan bantuan sosial secara langsung meskipun tidak terdapat agenda sosialisasi formal dari pemerintah desa. Hal tersebut mencerminkan adanya empati dan rasa tanggung jawab pelaksana terhadap kelancaran pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi, operator aplikasi SIKS-NG juga menunjukkan secara langsung proses pengelolaan data dalam aplikasi, termasuk data masyarakat yang menerima maupun tidak menerima bantuan sosial. Keterlibatan aktif operator dalam menjelaskan proses pengelolaan data tersebut menunjukkan komitmen pelaksana dalam mendukung implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung. Untuk memperkuat hasil observasi tersebut, peneliti mendokumentasikan kegiatan wawancara dan penjelasan yang diberikan oleh operator aplikasi SIKS-NG terkait proses pengelolaan data bantuan sosial. Gambar 4 di bawah ini menampilkan dokumentasi terkait hal tersebut :



Gambar 4. Wawancara Dengan Operator Aplikasi SIKS-NG Desa Semambung Tahun 2025
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025.

Berdasarkan gambar 4 bahwa operator aplikasi SIKS-NG memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem yang digunakan serta mampu menjalankan pengelolaan data sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun tidak lagi memperoleh insentif khusus, operator tetap berkomitmen dalam melakukan pembaruan data dan memberikan informasi terkait bantuan sosial kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disposisi yang baik dalam mendukung implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung. Selain tercermin dari komitmen dalam menjalankan tugas, disposisi pelaksana juga terlihat dari kepeduliannya dalam memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat terkait prosedur pengajuan bantuan sosial. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Lusi Rosita Prayitno selaku operator aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung:

“kalau sosialisasi disini enggak tapi kalau misalnya ada orang bertanya mbak saya mau mengajukan untuk bantuan A nanti saya bilang untuk mendapatkan bantuan anda harus masuk ke data DTKS atau data enggak kalau saya bilanganya gampangannya masih harus masuk data miskin dulu nanti kalau masuk ini harus melengkapi berkas ini jadi kalau belum masuk ini tidak bisa mengajukan untuk mendapat bantuan ini. Jadi kalau sosialisasinya jika ada orang yang bertanya untuk meminta bantuan maka harus ke saya infokan kalau bantuan sekarang melalui aplikasi ini lo harus masuk ini dulu lo datanya harus masuk ini harus ada share lokasinya harus ada foto rumahnya datanya harus scan an asli. jadi enggak saya infokan ke RT takutnya nanti akan jadi miskomunikasi jadi misalnya kalau ada orang yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan harus ke saya langsung” (Hasil wawancara, 01 Agustus 2025). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa indikator disposisi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung telah beroperasi cukup baik. Meskipun tidak lagi menerima insentif khusus, pelaksana tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan dedikasi dalam mendukung jalannya program. Selain itu, pelaksana juga tetap memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat terkait prosedur pengajuan bantuan, meskipun tidak terdapat kegiatan sosialisasi formal dari pihak desa. Pelaksana lebih memilih menyampaikan informasi secara personal untuk menghindari kesalahpahaman. Sikap tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelancaran pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi telah tercapai melalui komitmen, motivasi, dan kepedulian pelaksana terhadap keberhasilan implementasi aplikasi SIKS-NG.

Hasil ini juga disandingkan penelitian sebelumnya oleh evi Andriani, Tatik Nurhayati, dan Widia Astuti yang berjudul *“Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan.”* Hasilnya yaitu pelaksanaan aplikasi SIKS-NG masih belum maksimal. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui terbatasnya fasilitas seperti laptop yang kurang memadai serta rendahnya pemahaman teknologi di kalangan staf pelaksana. Selain itu, masih ada beberapa masyarakat kurang mampu belum menerima bantuan meskipun telah terdata dalam DTKS, sehingga menunjukkan belum maksimalnya proses pendataan dan penyaluran bantuan. Permasalahan lainnya contohnya ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan serta NIK ganda turut menghambat ketepatan sasaran program bantuan sosial [1].

D. Struktur Birokrasi

Edward III menegaskan bahwa struktur birokrasi menjadi salah satu variabel penting, sekaligus variabel keempat, yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, implementasi aplikasi SIKS-NG termasuk dalam bidang E-Government karena digunakan oleh pemerintah desa dalam pelayanan publik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial secara digital. Edward III memberikan penjelasan bahwa ada dua aspek utama struktur birokrasi, yakni mekanisme pelaksanaan yang diwujudkan dalam SOP serta struktur organisasi yang menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab. Edward III menjelaskan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan telah memahami tugas yang harus dijalankan, memiliki sikap yang mendukung, serta ditunjang sumber daya memadai, proses implementasi tetap bisa terhambat bila struktur birokrasi, khususnya SOP dan pembagian kerja, belum berjalan secara efektif. [14]. Standard operating procedure (SOP) adalah pedoman yang mengatur proses pelaksanaan setiap pola kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. SOP berfungsi sebagai acuan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab sekaligus tugasnya. SOP yang tersusun secara jelas dan sistematis pada penerapannya dapat membantu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terarah, meningkatkan efisiensi, serta menunjang ketercapaian tujuan organisasi sebagaimana visi misi dengan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. [15]. Struktur organisasi ini adalah suatu susunan yang bisa memberi gambaran terkait pembagian wewenang, tugas, serta tanggung jawab dalam organisasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Keberadaan struktur organisasi menjadi langkah awal yang penting untuk mendukung terlaksananya fungsi manajemen, yang mencakup pengorganisasian, perencanaan, pengawasan serta pengarahan secara efektif [16].

Dalam standar operating procedure (SOP) di desa semambung belum memiliki SOP terkait SIKS-NG dan desa belum memiliki SOP sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Rizal Havidhi Ismail selaku Kasi Pelayanan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu :

“ Kalau saat ini di Desa Semambung memang belum ada SOP khusus untuk SIKS-NG, bahkan desa sendiri juga belum memiliki SOP” (Hasil wawancara, 01 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Desa Semambung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan aplikasi SIKS-NG. Bahkan, secara umum desa juga belum memiliki SOP tertulis sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi SIKS-NG masih mengandalkan pemahaman dan pengalaman pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, implementasi aplikasi tetap dapat berjalan melalui koordinasi antarperangkat desa sesuai pembagian kewajiban

serta tugas masing-masing. Guna memperjelas pembagian tugas sekaligus wewenang dalam pemerintahan Desa Semambung, struktur organisasi desa yaitu:



Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semambung
Sumber : Dari Perangkat Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa pada posisi tertinggi terdapat Kepala Desa Naning Andiar, S.E., yang dibantu oleh Sekretaris Desa Ratna Utami Ningrum, S.H. Di bawah Kepala Desa terdapat pembagian kerja meliputi Kasi Pemerintahan (Yunus), Kasi Kesejahteraan (Ulil Amri), dan Kasi Pelayanan (Rizal Havidhi Ismail). Sementara itu, di bawah Sekretaris Desa terdapat Kaur TU dan Umum (Lusi Rosita Prayitno, S.Pd.), Kaur Keuangan (Fathkur Roji), serta Kaur Perencanaan (Tri Ulul Ulfah). Selain itu, terdapat Kasun Semambung Lor (H. Abd. Munif) dan Kasun Semambung Kidul (Babus Imam Syafri Assaqui, S.Ds.) yang bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing. Berdasarkan pembagian tugas dalam struktur organisasi tersebut, Ibu Lusi Rosita Prayitno yang menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum juga diberi tanggung jawab sebagai operator aplikasi SIKS-NG. Tanggung jawab tersebut berada dalam bidang administrasi pemerintahan desa karena berkaitan dengan pengelolaan data kesejahteraan sosial dan pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi di Desa Semambung telah berjalan secara efektif. Setiap pemegang jabatan bekerja sesuai fungsi serta tugas pokoknya sendiri-sendiri. Untuk mekanisme koordinasi, Kaur berkoordinasi dengan Sekretaris Desa, sedangkan Kasi berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa. Dengan adanya pembagian tugas dan alur koordinasi yang jelas, pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih tertib dan terarah. Keberadaan struktur organisasi yang jelas menunjukkan bahwa aspek pembagian kerja dalam indikator struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Namun, dari aspek prosedur pelaksanaan masih ditemukan kelemahan karena belum tersedianya SOP khusus yang mengatur pengelolaan aplikasi SIKS-NG. Dengan demikian, implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung didukung oleh struktur organisasi yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penyusunan SOP sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, konsisten, dan akuntabel.

Temuan ini juga disandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Nova Rochmatul Faiza, Teguh Santoso dan Radjikan yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)”. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG untuk proses pemutakhiran DTKS memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi, dan prosedur yang jelas agar proses verifikasi dan validasi data berjalan efektif. Hasil lapangan menunjukkan masih sering terjadi ketidaksesuaian data NIK Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi nyata di lapangan yang mengakibatkan ketidakselarasan data dan menimbulkan hambatan dalam distribusi bantuan.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, yaitu pelaksanaan aplikasi tersebut masih belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan beberapa kendala pada setiap indikator kebijakan. Pertama, pada aspek komunikasi, komunikasi internal antar perangkat desa, khususnya antara operator dan Kasi Kesejahteraan, telah berjalan dengan baik. Namun, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum maksimal karena belum adanya sosialisasi formal terkait penggunaan aplikasi maupun proses pengajuan data. Penyampaian informasi masih bersifat pasif, yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor desa. Kedua, pada aspek sumber daya, implementasi SIKS-NG belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai. Pengelolaan aplikasi masih bergantung

pada satu orang operator tanpa adanya tenaga pendukung, serta masih menggunakan perangkat pribadi dalam pelaksanaannya. Meskipun fasilitas contohnya printer sekaligus komputer telah ada dengan kondisi yang baik, kendala jaringan internet yang tidak stabil serta belum adanya anggaran khusus dari desa menjadi hambatan dalam mendukung operasional aplikasi. Ketiga, pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pengelolaan SIKS-NG. Walaupun belum memperoleh insentif maupun pelatihan khusus, operator tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan dan mengelola data masyarakat. Keempat, pada aspek struktur birokrasi, Desa Semambung belum memiliki SOP khusus terkait pengelolaan SIKS-NG. Pelaksanaan pekerjaan masih mengacu pada arahan lisan dan pengalaman operator. Meskipun struktur organisasi desa telah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, belum adanya SOP serta keterbatasan waktu akses aplikasi berdasarkan ketentuan pemerintah pusat menjadi kendala dalam meningkatkan fleksibilitas pelayanan dan ketepatan pengelolaan data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT untuk karunia, rahmat, dan nikmat-Nya, untuk itu artikel dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu” bisa terselesaikan dengan baik. Selama proses penyusunan artikel ini penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan juga dukungan dari banyak pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaiannya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada Pemerintah Desa Semambung yang sudah memberi kesempatan sekaligus izin pada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan membantu dalam memperoleh data dan informasi mengenai implementasi aplikasi SIKS-NG di tingkat desa. Penghargaan dan apresiasi juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang sudah memberi masukan, arahan, dan bimbingan sepanjang proses pembuatan artikel ini. Selain itu, kepada Ibu Lusi Rosita Prayitno selaku Operator Aplikasi SIKS-NG di Desa Semambung dan Bapak Rizal Havidhi Ismail selaku Kepala Pelayanan Desa Semambung yang sudah berkenan menjadi informan dan juga memberi data serta informasi yang mendukung kelengkapan penelitian. Terima kasih juga kepada keluarga yang senantiasa memberi motivasi, doa, serta dukungan dan kepada seluruh rekan dan pihak lain yang sudah membantu selama menyusun artikel ini. Penulis berharap artikel ini bisa memberi kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, terutama dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

REFERENSI

- [1] Y. Andriani et al., “Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 11 – Nomor 2 , November 2023 , (Hlm 129-147) melalui cara yang lebih efektif dan modern (Kurniasih & Wismaningtyas , 2020). Hal ini vol. 11, no. November, pp. 129–147, 2023, doi: 10.34010/agregasi.v11i2.11255.
- [2] idria M. Wahyu Hidayat Ibrahim, “Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar,” vol. 3, no. 2, pp. 17–22, 2017.
- [3] S. F. R.M. Iman Rifai Rusdy, “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Oleh :,” Ilm. Ilmu Huk., no. 95, pp. 218–239, 2023, doi: 10.28946/lexl.v5i2.2351.
- [4] E. E. Wahyudi, P. Magister, and A. Publik, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan,” vol. 01, no. 02, pp. 163–172, 2024.
- [5] W. Wahyuni, R. Dwiarto, S. Ronida, and B. Giyanto, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH),” 2018.
- [6] E. Adawiyah, “Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya,” Vol.1, No. April, Pp. 43–50, 2020.
- [7] Sunarto, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan,” vol. 3, pp. 97–112, 2021.
- [8] D. A. 2022 Haromin, “Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalenga,” vol. 6, no. November, 2022.
- [9] S. Studies, “Jenis jenis komunikasi,” vol. 2, pp. 29–37, 2021.

- [10] N. R. Faiza and T. Santoso, "Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)," 1945.
- [11] "Manajemen Sumber Daya Manusia Eri Susan 1," no. 2, pp. 952–962, 2019.
- [12] T. Ulum et al., "Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial," vol. 11, pp. 184–187, 2024.
- [13] J. A. Reform and M. R. Rahmani, "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di provinsi kalimantan timur," vol. 8, no. 2, pp. 85–94, 2020.
- [14] Y. L. M. G. T. DENGO, "Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," J. Adm. Publik, vol. VIII, no. 120, pp. 60–68, 2022.
- [15] Subandi, E. Rahmawati, and H. Inayati, "Pemahaman Konseptual Tentang Standard Operating Procedure (Sop) : Dasar , Tujuan , Manfaat , Pemahaman Konseptual Tentang Standard," J. MEDIA Akad., vol. 2, no. 6, 2024.
- [16] N. A. Juru, "Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng," vol. 4, no. 2, pp. 408–421, 2020.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.